

**PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI
KANTOR DESA MANUNGGAL KARYA KECAMATAN
RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO)**

Oleh :

**SITI NURALIMAH
NIM : E21.19.132**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KANTOR DESA MANUNGGAL KARYA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO)

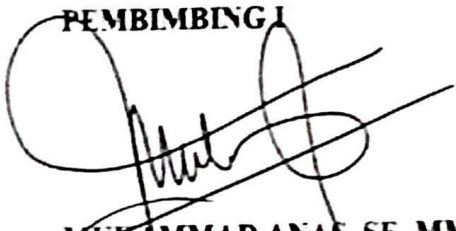
Oleh :

**SITI NURALIMAH
NIM : E21.19.132**

SKRIPSI

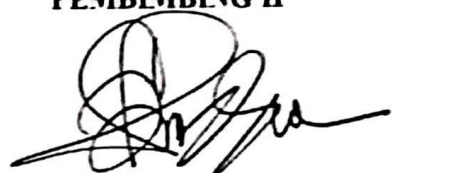
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna memperoleh gelar Sarjana
Dan Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 11 Juni 2020

PEMBIMBING I



MUHAMMAD ANAS, SE., MM
NIDN : 0920057402

PEMBIMBING II



SRI DAYANI ISMAIL, SE., MM
NIDN : 9090780020

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KANTOR DESA MANUNGGAL KARYA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO)

Oleh :

SITI NURALIMAH
NIM : E21.19.132

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. TAMSIR, SE., MM
2. HARIS HASAN, SE.,MM
3. SULAIMAN, SE., MM
4. MUHAMMAD ANAS, SE., MM
5. SRI DAYANI ISMAIL, SE., MM



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Manajemen



Eka Zahra Solikhah, SE.,MM
NIDN : 09 220 185 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan



SITI NURULIMAH
E21.19.132

ABSTRAK

Siti Nuralimah, NIM. E21.19.132, Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato) dibimbing Oleh Muhammad Anas, SE.MM., Dan Sri Dayani Ismail, SE., MM.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y) diterima. Dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan didukung dengan oleh nilai signifikansi variabel X lebih kecil dari pada tingkat kemaknaan 5%. Sedangkan Nilai koefisien determinasi (R^2) pada hasil penelitian menunjukkan angka 0,387 atau 38,70%, memiliki makna bahwa variabel fungsi pengawasan memberikan kontribusi sebesar 38,70% terhadap variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan sisanya sebesar $100 - 38,70 = 61,30\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

Siti Nuralimah, NIM. E21.19.132, *The Effect of the Supervision Function on the Effectiveness of Village Fund Allocation Management (Case Study at the Manunggal Karya Village Office, Randangan Village, Pohuwato District)* guided by Muhammad Anas, SE.MM., and Sri Dayani Ismail, SE., MM.

The purpose of this study is to identify and analyze the supervisory function which has a positive and significant effect on the effectiveness of the management of village fund allocations at the Manunggal Karya Village Office, Randangan District, Pohuwato Regency. Evidenced by the value of $t_{count} > t_{table}$ value, and supported by the significance value of the variable X is smaller than the 5% significance level. While the value of the coefficient of determination (R^2) in the results of the study shows the number 0.387 or 38.70%, which means that the variable of the supervisory function contributes 38.70% to the variable of effectiveness in managing the allocation of village funds at the Manunggal Karya Village Office, Randangan District, Pohuwato Regency. While the remaining $100 - 38.70 = 61.30\%$ is explained by other variables outside the model.

Keywords: *Supervision Function, Effectiveness of Village Fund Allocation Management.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkarkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato)”, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar Ladjokke., M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM., selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Univesitas Ichsan Gorontalo, Ibu Eka Zahra Solikahan, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen. Bapak Muhammad Anas, SE.,MM Selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Sri Dayani Ismail, SE.,MM, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. serta bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu dan mendukung saya serta teman-teman seangkatan jurusan manajemen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Desa	8
2.2. Pengertian Efektivitas	11
2.3. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	13
2.4. Pengertian Fungsi Pengawasan	18
2.5. Kerangka Pikir	21
2.6. Hipotesis	22

BAB III OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1. Obyek Penelitian	23
3.2. Metodologi Penelitian	23
3.2.1. Desain Penelitian.....	22
3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	23
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.4. Jenis dan Sumber Data	27
3.2.5. Populasi	28
3.3. Metode Analisis.....	28
3.4. Pengujian Hipotesis.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Manunggal Karya.....	30
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Manunggal Karya	32
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Manunggal Karya.....	33
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	34
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Fungsi Pengawasan	36
4.2.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (Y)	
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	40
4.3. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	45
4.4. Uji Hipotesis.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Bobot Alternatif Skala Likert.....	24
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	24
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item.....	35
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Pada Variabel Fungsi Pengawasan (X)	36
Tabel 4.3. Tanggapan Responden pada Variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Y).....	41
Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Analisis Regresi.....	46
Tabel 4.5. Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	47
Tabel 4.6. Hasil Output Regresi Uji-t.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner	54
Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi.....	58
Lampiran 3. Tabulasi Data.....	61
Lampiran 4. Jadwal Penelitian.....	63
Lampiran 5. Hasil Test Turnitin.....	64
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	66
Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian.....	67
Lampiran 8. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	68
Lampiran 9. Curriculum Vitae.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Muntinghe, seorang warga Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan Kolonial Inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai desa perlu kita lihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial. (https://www.academia.edu/36097747/Memahami_Sistem_Pemerintahan_Desa_.Docx). (Diakses, 14 Mei 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>). (Diakses, 15 Mei 2019).

Menyadari bahwa desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bagian yang penting dari suatu masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan, pemerintahan dan perekonomian. Begitu pentingnya peranan desa dalam segala bidang, oleh karena itu desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan keberadaan desa semakin mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dengan dibentuknya Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi untuk menangani kegiatan yang ada di desa, termasuk dalam hal ini pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN. Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam buku saku dana desa (2017 : 1) bahwa pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien,

dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut, Sri Mulyani Indrawati dalam (buku pintar dana desa 2018 : iv)

Agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lancar dan efektif sesuai dengan peruntukannya, maka dibutuhkan suatu pengawasan yang intensif oleh pihak yang berwenang, sehingga kesalahan-kesalahan pengelolaannya dapat diminimalisir untuk menuju pada sasaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat Desa.

Pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif

demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas menjadi prasyarat penting, Pengawasan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. (Ade, 2017) dalam Lisna, dkk (2018 : 9).

Pengawasan alokasi dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pengggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa.

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato adalah Desa Manunggal Karya yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.772 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 883 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 889 jiwa. Dibawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa Amir Mahmud, S.Pdi juga merupakan salah satu desa yang mengelola dana desa yang tentunya perlu pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah baik pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengelolaan dana desa yang pada akhirnya efektivitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, "Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu Apakah fungsi pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yaitu untuk mengumpulkan

data-data yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi,

Sebagai masukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif pada umumnya dan khususnya Desa Manunggal Karya Kabupaten Pohuwato.

2. Bagi Peneliti,

Sebagai pembuktian teori-teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai alokasi dana desa serta bentuk pengawasan,

3. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan baik dosen maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif yang dipengaruhi oleh fungsi pengawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambangkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya atau majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri serta berhak atas tanahnya sendiri. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 : 2).

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku saku dana desa dinyatakan bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 2014, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> (diakses, 20 Mei 2019) tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan pada masyarakat yang setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada azas sebagai berikut:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai

yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah yang mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (diakses, 21 Maret 2020).

2.2. Pengertian Efektivitas

Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Oleh karena itu, banyak pengertian efektivitas menurut para ahli, sebagaimana menurut Susanto (2004 : 47) bahwa efektivitas adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar outputnya yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Sedangkan dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Marsam, dkk, 2000 : 123) efektif adalah hasil guna. Efektivitas adalah ukuran hasil atau pencapaian tujuan.

Sedarmayanti (2001 : 59) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas.

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan

efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien, oleh karena itu efektifitas berarti sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Setiawan (2009), (<http://www.suarapembaruan.com>), (diakses 15-Maret-2020).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Mahmudi (2015 : 86) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* dan proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, dan kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas menunjukkan hasil (*output*) sesuai dengan yang diharapkan (*goal*) atau mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Efektivitas diartikan sebagai hasil guna. Mengukur tingkat efektivitas sebuah perusahaan atau unit kerja adalah dengan membandingkan antara hasil dengan standar atau sasaran atau tujuannya. (Ismail dan Prawironegoro, 2009 : 56).

Siagian (2003 : 85) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Effendy (2003 : 14) menyatakan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Sedangkan Handoko (2000 : 127) mengemukakan bahwa fektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu. Kata kunci pengertian ini adalah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu sendiri.

Dari definisi atau batasan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah pada pencapaian tujuan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan efektivitas tidanya tujuan dan sasaran yang digariskan, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai.

2.3. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip dalam (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>)

(Diakses, 15 Maret 2020) kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahu 2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 37 tahun 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (<http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>). (Diakses, 15 Maret 2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Lapananda (2016: 21-22) [*https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/.../buku-hukum-pengelolaan-keuangan-\(diakses, 20-Maret-2020\)*](https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/.../buku-hukum-pengelolaan-keuangan-(diakses,20-Maret-2020)) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Sebagaimana Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Buku Saku Dana Desa (2017 : 320) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara efektif meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan perencanaan, meliputi:

- a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
- b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pelaksanaan, meliputi:

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes;
- c. Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
- d. Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota;
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan penatausahaan, meliputi:

- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;

- c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- e. Laporan diampaiakan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya; dan
- f. Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pelaporan dan Pertanggung jawaban, meliputi:

- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Cama yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
- c. Lampiran Format laporan, berkenaan dengan:
 - a) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A
 - b) Kekayaan Milik Desa, dan
 - c) Program Pemerintah dan Desa yang masuk ke Desa

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi

yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan dana yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

2.4. Pengertian Fungsi Pengawasan

Pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas menjadi prasyarat penting, Pengawasan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. (Ade, dkk, (2017) dalam Lisna, dkk (2018 : 9).

Menurut LAN (2000 : 145) sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas., hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut;
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Menurut Sutedi dalam Lisna, dkk (2018 : 10), hukum keuangan negara mengenal dua jenis pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara menurut ruang lingkupnya yaitu pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan

ekstern (*extern control*). Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi, dimana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan membentuk suatu organisasi khusus yang menangani secara menyeluruh pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Dana Desa.

Handoko (1996 : 359) mengemukakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan Sedangkan pengawasan menurut Robert J. Mockler dalam Handoko (1996 : 360) adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang paling efektif jika dimulai dari tahap perencanaan sampai pada akhir suatu kegiatan. Sedangkan pengawasan yang dilaksanakan dalam suatu proses melalui tahapan-tahapan pelaksanaan tertentu.

Dalam Buku Saku Dana Desa (2017 : 56) menjelaskan bahwa pemerintah pusat melakukan sinergi, baik antarkementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Manullang (1991 : 183-184) yang menyatakan bahwa proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

a. Menetapkan alat ukur (*standard*)

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan.

b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)

Apa yang seharusnya dicapai dan apakah sudah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan harus dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarkhi organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana. Dengan adanya buku saku yang telah diterbitkan oleh pemerintah maka masyarakat desa terlibat serta untuk melakukan pengawasan alokasi dana desa.

2.5. Kerangka Pikir

Penelitian tentang pengaruh fungsi manajemen diperlukan sebagai bentuk untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah efektivitas yang diterapkan oleh Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka sebelumnya, dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagaimana berikut:

Gambar. Kerangka Pikir



2.6. Hipotesis

Dari uraian masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu Fungsi pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dalam arti sempit desain penelitian adalah pengumpulan dan analisa data (Mohammad Nazir, 1988 : 99). Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian diskriptif. Desain penelitian diskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian, yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

3.2.2. Operasionalisasi variabel penelitian

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen, adapun variabel independennya adalah fungsi pengawasan (X) berupa sedangkan variabel dependennya adalah efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Pada penelitian yang dilakukan penulis, pembobotan untuk setiap pilihan atau alternatif pada kuisioner berdasarkan Skala Likert. Menurut Kinnear dalam

Husain Umar (2002 : 98), bahwa Skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Alternatif pernyataannya, misalnya dari sangat setuju sampai tidak setuju, sangat senang sampai tidak senang, sangat puas sampai tidak puas atau sangat baik sampai tidak baik.

Tabel 3.1 Bobot Alternatif Skala Likert

Pilihan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Definisi operasionalisasi variabel ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami dengan mudah agar tidak terjadi multitafsir dalam mengidentifikasi setiap variabel yang ada dan memberikan batasan-batasan variabel, sebagaimana yang tampak pada tabel berikut :

Tabel. 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Fungsi Pengawasan (X)	a. Menetapkan alat ukur (<i>standard</i>)	a. Sesuai dengan rencana b. Sesuai dengan pedoman c. Sesuai dengan kebijaksanaan d. Sesuai dengan peraturan	Ordinal
	b. Mengadakan penilaian (<i>evaluatif</i>)	a. Sesuai capaian b. Sesuai tolak ukur	
	c. Mengadakan tindakan perbaikan (<i>corrective action</i>)	a. Penyesuaian terhadap kebijaksanaan b. Penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan c. Penyesuaian terhadap dengan pemberian bimbingan atau sanksi	
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	a. Perencanaan	a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;	

(Y)		<ul style="list-style-type: none"> b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat. 	
	b. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah; b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes; c. Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota; d. Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota; e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa. 	
	c. Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran; c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan; d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan; e. Laporan diampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan 	

		berikutnya; dan f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.	
	d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Cama yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun; b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan c. Lampiran Format laporan, berkenaan dengan: a) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A b) Kekayaan Milik Desa, dan c) Program Pemerintah dan Desa yang masuk ke Desa	

Sumber: Manullang (1991 : 183-184) dan Buku Saku Dana Desa (2017 : 32)

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan literatur-literatur baik itu buku-buku, majalah-majalah, maupun buletin-buletin yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
3. Kuisisioner, yaitu menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Kuisisioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang akan dianalisis.

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data kualitatif, yaitu data-data yang berupa pernyataan-pernyataan/ pertanyaan-pertanyaan atau uraian-uraian dari sumber data yang ada
2. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka atau nilai-nilai, tabel, dan grafik yang sifatnya dapat dihitung atau dijumlahkan.

b. Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui pembagian angket atau kuisisioner kepada responden.

2. Data sekunder, yaitu data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.2.5. Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karenanya dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2014). Sedangkan menurut Sugiono (2017 : 268) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena.. Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer secara sistim sampel karena jumlah responden hanya 15 orang.

3.3. Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi sederhana. Regresi sederhana menurut Sugiyono (2017 : 270) yaitu metode analisis yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa regresi sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas yaitu fungsi pengawasan (X) pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Dimana:

ε	=	Standar error
Y	=	Efektivitas Pengelolaan ADD
α	=	Nilai konstan
β	=	Parameter
X	=	Fungsi Pengawasan

3.4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian pengaruh variabel independen terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen (Algifari, 2000 : 154). Untuk itu perlu dilakukan uji Anova. Uji Anova dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Adapun tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05.

Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Apabila *probability value* hasil penelitian < *Probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif
- Apabila *probability value* hasil penelitian > *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Manunggal Karya

Desa Manunggal Karya merupakan Desa Ex-Transmigrasi UPT Marisa yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan agama yang berasal dari berbagai daerah yaitu suku Jawa, suku Bali, suku Madura, NTB, Minahasa dan warga Gorontalo.

Pada awal kedatangan Warga Transmigrasi UPT Marisa 1 di daerah Gorontalo pada tanggal 17 Januari Tahun 1981 yang merupakan daerah pengembangan dari program Kementrian Transmigrasi. Awal pemerintah Warga Transmigrasi UPT Marisa 1 diawasi dan dibina oleh Dinas Transmigrasi selama 7 Tahun dan dipimpin oleh Kepala Unit. Setelah Pemerintah Daerah setempat pada Tahun 1987 untuk menjadi persiapan Desa Definitif. Dalam proses persiapan menjadi Desa Definitif para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh sesepuh mengadakan musyawarah untuk memilih Kepala Desa Definitif dan Nama Desa. Dari beberapa argument, aspirasi dan pertimbangan yang matang maka disepakati bersama Nama UPT Marisa 1 diganti menjadi Desa Manunggal Karya yang mengandung makna :

- Manunggal artinya Menyatu
- Karya artinya Bekerja

Jadi dapat disimpulkan bahwa Warga yang berasal dari berbagai daerah, macam-macam suku dan agama mereka bertekad menyatukan kehendak untuk berkarya atau bekerja membangun Desa.

Pada mulanya Desa Manunggal Karya sesuai kondisi geografis dan luas wilayah dibagi menjadi 2 Wilayah yaitu Sub A dan Sub B Dan terdiri dari 4 Dusun. Seiring perkembangan masyarakat, jumlah penduduk dan program pemerintah pada Tahun 2002 Desa Manunggal Karya dimekarkan menjadi 2 Desa, dengan daerah pemekaran yang dinamakan Desa Banuroja. Setelah itu Desa Manunggal Karya membagi wilayahnya menjadi 4 Dusun dan 8 RT. Kemudian sesuai dengan peraturan penataan pemerintahan maka Desa Manunggal Karya menghapus pembagian wilayah RT, sehingga kini pembagian kewilayahan hanya terdiri dari Dusun dan berkembang menjadi 7 Dusun. Selama awal pemerintahan Desa Manunggal Karya sering mengalami banjir yang selalu merugikan perekonomian masyarakat yang mayoritas penduduknya sebagai petani, walaupun demikian masyarakat tetap konsisten dan eksis untuk menjalankan program pemerintahan dan perkembangan berbagai macam sector untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Setelah itu sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan di Desa Manunggal Karya maka mulai terlihat perkembangan perekonomian masyarakat yang sangat berkembang sehingga pembangunan perekonomian masyarakat yang sangat berkembang sehingga pembangunan di Desa Manunggal Karya sangat terlihat dan berdampak positif

sehingga Desa Manunggal Karya dapat dikategorikan sebagai desa yang maju didaerah Transmigrasi pada Khususnya

Sampai dengan saat ini Desa Manunggal Karya sesuai kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah menjadi Desa definitif yang terdiri dari 7 susun dan berada di wilayah Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Manunggal Karya

a. Visi

“Terwujudnya Desa Manunggal Karya sebagai desa yang mandiri untuk mencapai masyarakat yang Cerdas ,Adil ,Makmur dan Sejahtera”

b. Misi

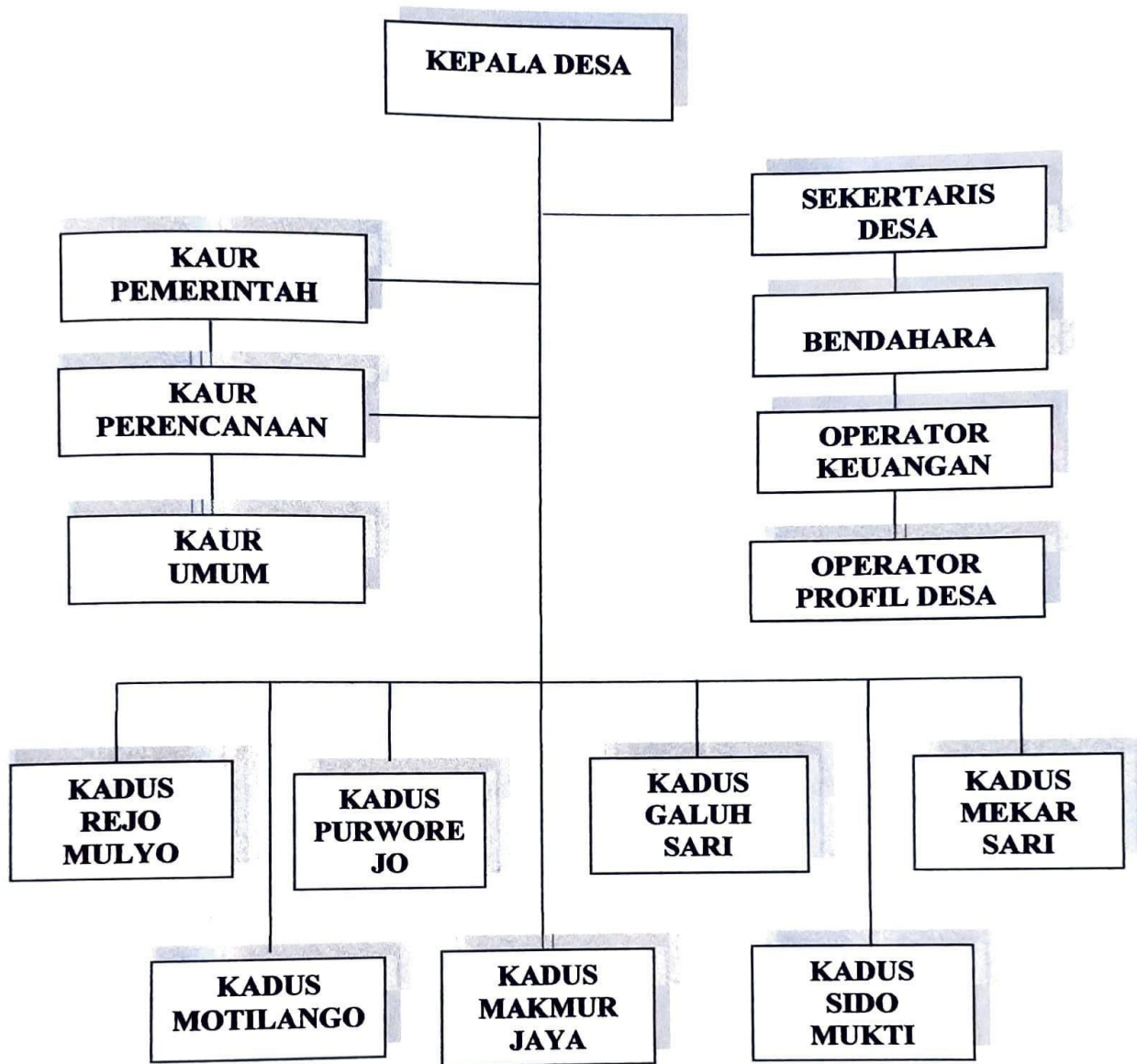
1. Mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan lokal (seni tradisional) HUT TRANSMIGRASI yang telah menjadi kerukunan keberagaman budaya desa manunggal karya
2. Meningkatkan profesionalisme kerja perangkat desa sebagai pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pendampingan khusus pembuatan KTP, BPJS dan PRO DUKA secara terpadu dan tepat.
4. Memberikan peluang kerja terhadap pemuda dan pemudi desa sesuai kebutuhan.
5. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), Industri Rumahan.

6. Menghidupkan kembali kegiatan pemuda dan olahraga serta organisasi kepemudaan dengan mengaktifkan kembali karang tarun, (Pembangunan Fasilitas dan sarana Olah Raga).
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan Desa, Jalan lingkungan, sarana air bersih, saluran air, kantin desa, sarana keagamaan serta infrastruktur strategis lainnya.
8. Memberikan perlindungan dan mendampingi hukum atas hak-hak atas masyarakat dalam penyelesaian masalah rembesan tanggul dan irigasi
9. Memberikan dan meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Job Description (Uraian Tugas)

Dalam organisasi hal yang paling mendasar dalam menjalankan suatu aktivitas adalah suatu kerjasama yang baik antara para anggota, untuk dapat melakukan hal tersebut perlu adanya identitas dari masing-masing anggota lain, untuk itu perlu adanya pembagian tugas agar setiap karyawan dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajibannya. Tanpa struktur yang mantap maka dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam menjalankan tugasnya masing-masing oleh pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini diperlukan struktur organisasi yang baik untuk dapat mengatur tugas dan kegiatannya dalam suatu perusahaan. Untuk lebih jelas struktur organisasi PT. Hasjrat Abadi Outlet Cabang Marisa Kabupaten Pohuwato.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Variabel dalam penelitian ini yaitu fungsi pengawasan sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y), adapun jumlah seluruh pertanyaan/pernyataan untuk variabel X yaitu sebanyak 9 item

sedangkan variabel Y yaitu sebanyak 20 item sehingga jumlah butir atau item pertanyaan/pernyataan yaitu sebanyak 29 dan setiap item pertanyaan/pertanyaan direspon oleh 15 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yakni:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 1 \times 15 = 15$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 1 \times 15 = 75$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{75 - 15}{5} = 12$$

Tabel 4.1
Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
67 – 79	Sangat besar
54 – 66	Besar
41 – 53	Sedang
28 – 40	Kecil
15 – 27	Sangat kecil

Sumber : Data Olahan, 2020

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing-masing indikator untuk setiap variabel yaitu variabel X dan variabel Y sebagai jawaban responden atas pernyataan/pertanyaan terdiri dari 29 item yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan melalui angket. dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Fungsi Pengawasan

Hasil penelitian variabel fungsi pengawasan (X) sebanyak 9 item atau butir pernyataan/pertanyaan yang direspon oleh 15 responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2.
Tanggapan Responden pada Variabel Fungsi
Pengawasan (X)

Item	SS			S			N			TS			STS			S k o r
	5			4			3			2			1			
	F	S	%	f	S	%	f	S	%	f	S	%	f	S	%	
1	2	10	13,33	9	36	60,00	4	12	26,67	-	-	-	-	-	-	58
2	3	15	20,00	9	36	60,00	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	60
3	1	5	6,67	9	36	60,00	5	15	33,33	1	2	6,67	-	-		56
4	1	5	6,67	10	40	66,67	4	12	26,67	-	-	-	-	-	-	57
5	8	40	53,33	4	16	26,67	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	65
6	2	10	13,33	10	40	66,67	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	59
7	3	15	20,00	10	40	66,67	2	6	13,33	-	-	-	-	-	-	61
8	3	15	20,00	8	32	53,33	4	12	26,67	-	-	-	-	-	-	59
9	0	0	0,00	9	36	60,00	6	18	40,00	-	-	-	-	-	-	54
Total Skor																529
Jumlah Responden																15

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel 4.5. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan skor 10, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, dan 4 responden yang menyatakan netral atau 26,67% dengan skor 12, sedangkan total skor adalah 58, hal ini masuk pada kategori besar. Tanggapan responden pada item kedua yaitu 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan skor 15, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan skor 36, serta 3 responden atau 20,00% yang menjawab netral dengan item skor 19, dari total skor sebesar 60, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketiga yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, sebanyak 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, dan 5 responden atau 13,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 5, serta 1 responden atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju dan item skor sebesar 2 sedangkan total skornya adalah 56, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keempat yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 4 responden atau 26,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12, sedangkan total skornya adalah 57, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kelima yaitu sebanyak 8 responden atau 53,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 40, dan 4 responden atau 26,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9 sedangkan total skornya

adalah 65, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keenam yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 59, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketujuh yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 4 responden atau 26,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12, sedangkan total skornya adalah 61, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedelapan yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan item skor 32, serta 4 responden atau 26,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12, sedangkan total skornya adalah 59, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketujuh yaitu sebanyak 5 responden atau 23,81% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 25, dan 13 responden atau 61,90% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 4 responden atau 19,05% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12 sedangkan total skornya adalah 86, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedelapan yaitu sebanyak 30 responden atau 28,57% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 30, dan 12 responden atau 57,14% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 3 responden atau 14,29% yang menyatakan netral dan

item skor sebesar 3, sedangkan total skornya adalah 87, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kelima yaitu sebanyak 5 responden atau 23,81% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 25, dan 13 responden atau 61,90% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 4 responden atau 19,05% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12 sedangkan total skornya adalah 86, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keenam yaitu sebanyak 30 responden atau 28,57% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 30, dan 12 responden atau 57,14% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 3 responden atau 14,29% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 3, sedangkan total skornya adalah 87, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketiga yaitu sebanyak 4 responden atau 19,05% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 20, dan 14 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 56, serta 3 responden atau 14,29% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 85, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keempat yaitu sebanyak 5 responden atau 23,81% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 25, dan 12 responden atau 57,14% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 4 responden atau 19,05% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12, sedangkan total skornya adalah 85, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketujuh yaitu sebanyak 5 responden atau 23,81% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 25, dan 13 responden atau 61,90% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 4 responden atau

19,05% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12 sedangkan total skornya adalah 61, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedelapan yaitu sebanyak 30 responden atau 28,57% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 30, dan 12 responden atau 57,14% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 3 responden atau 14,29% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 3, sedangkan total skornya adalah 59, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kesembilan yaitu tidak ada seorang responden yang menjawab sangat setuju dengan item skor 0, dan item kedua 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 6 responden atau 40,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 18 sedangkan total skornya adalah 54, hal ini masuk kategori besar.

4.2.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (Y) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka analisis deskriptif kuantitatif variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) memiliki dua puluh item pertanyaan/pertanyaan yang telah disebar melalui angket dan direspon dengan baik oleh pegawai di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.3
Tanggapan Responden Pada Variabel
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Item	SS			S			N			TS			STS			S k o r
	5			4			3			2			1			
	f	S	%	f	S	%	f	S	%	f	S	%	f	S	%	
1	5	25	33,33	8	32	53,33	2	6	13,33	-	-	-	-	-	-	63
2	2	10	13,33	8	32	53,33	5	15	33,33	-	-	-	-	-	-	57
3	3	15	20,00	10	40	66,67	1	3	6,67	1	2	6,67	-	-	-	58
4	2	10	13,33	10	40	66,67	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	59
5	1	5	6,67	8	32	53,33	6	18	40,00	-	-	-	-	-	-	55
6	1	5	6,67	11	44	73,33	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	58
7	1	5	6,67	12	48	80,00	2	6	13,33	-	-	-	-	-	-	59
8	-	-	-	9	36	60,00	6	18	40,00	-	-	-	-	-	-	54
9	2	10	13,33	13	52	86,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
10	-	-	-	7	28	46,67	7	21	46,67	1	2	6,67	-	-	-	49
11	2	10	13,33	9	36	60,00	4	12	26,67	-	-	-	-	-	-	58
12	3	15	20,00	10	40	66,67	2	6	13,33	-	-	-	-	-	-	61
13	1	5	6,67	11	44	73,33	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	58
14	6	30	40,00	8	32	53,33	1	3	6,67	-	-	-	-	-	-	65
15	3	15	20,00	10	40	66,67	2	6	13,33	-	-	-	-	-	-	61
16	3	15	20,00	9	36	60,00	3	9	20,00	-	-	-	-	-	-	60
17	1	5	6,67	9	36	60,00	5	15	33,33	-	-	-	-	-	-	56
18	2	10	13,33	8	32	53,33	5	15	33,33	-	-	-	-	-	-	57
19	3	15	20,00	7	28	46,67	5	15	33,33	-	-	-	-	-	-	58
20	2	10	13,33	9	36	60,00	4	12	26,67	-	-	-	-	-	-	58
Total Skor															= 1166	
Jumlah Responden															15	

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel 4.3. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama yaitu sebanyak 5 responden atau 33,33% yang menjawab sangat setuju dengan skor 25, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan item skor 32, serta 2 responden yang menyatakan netral atau 13,33% dengan skor

6, sedangkan total skor adalah 63, hal ini masuk pada kategori besar. Tanggapan responden pada item kedua yaitu 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan skor 10, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan skor 32, serta 5 responden atau 33,33% yang menjawab netral dengan item skor 15, dari total skor sebesar 57, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketiga yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, terdapat 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, dan 1 responden atau 6,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 3, serta 1 responden atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju dengan item skor sebesar 2, sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keempat yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dengan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 59, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kelima yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan item skor 32, serta 6 responden atau 40,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 18 sedangkan total skornya adalah 55, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keenam yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 11 responden atau 73,33% yang menjawab setuju dengan item skor 44, serta

3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketujuh yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 12 responden atau 80,00% yang menjawab setuju dengan item skor 48, serta 2 responden atau 13,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 6, sedangkan total skornya adalah 59, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedelapan yaitu 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 6 responden atau 40,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 18, sedangkan total skornya adalah 54, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kesembilan yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 13 responden atau 86,67% yang menjawab setuju dengan item skor 52, sedangkan total skornya adalah 62, hal ini masuk pada kategori besar. Tanggapan responden pada item kesepuluh yaitu sebanyak 7 responden atau 46,67% yang menjawab setuju dengan item skor 28, dan 7 responden atau 46,67% yang menjawab netral dengan item skor 21, serta 1 responden atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju dan item skor sebesar 2, sedangkan total skornya adalah 49, hal ini masuk kategori sedang.

Tanggapan responden pada item kesebelas yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 4 responden atau 26,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12 sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar. Adapun tanggapan responden pada item

kedua belas yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 2 responden atau 13,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 6, sedangkan total skornya adalah 61, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketiga belas yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 11 responden atau 73,33% yang menjawab setuju dengan item skor 44, serta 3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item keempat belas yaitu sebanyak 6 responden atau 40,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 30, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan item skor 32, serta 1 responden atau 6,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 3, sedangkan total skornya adalah 65, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kelima belas yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 10 responden atau 66,67% yang menjawab setuju dengan item skor 40, serta 2 responden atau 13,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 6, sedangkan total skornya adalah 61, hal ini masuk pada kategori besar. Tanggapan responden pada item keenam belas yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 3 responden atau 20,00% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 9, sedangkan total skornya adalah 60, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item ketujuh belas yaitu sebanyak 1 responden atau 6,67% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 5, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 5 responden atau 33,33% yang menyatakan netral dengan item skor sebesar 15 sedangkan total skornya adalah 56, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedelapan belas yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 8 responden atau 53,33% yang menjawab setuju dengan item skor 32, serta 5 responden atau 33,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 15, sedangkan total skornya adalah 57, hal ini masuk kategori besar.

Tanggapan responden pada item kesembilan belas yaitu sebanyak 3 responden atau 20,00% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 15, dan 7 responden atau 46,67% yang menjawab setuju dengan item skor 28, serta 5 responden atau 33,33% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 15, sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar. Tanggapan responden pada item kedua puluh yaitu sebanyak 2 responden atau 13,33% yang menjawab sangat setuju dengan item skor 10, dan 9 responden atau 60,00% yang menjawab setuju dengan item skor 36, serta 4 responden atau 26,67% yang menyatakan netral dan item skor sebesar 12, sedangkan total skornya adalah 58, hal ini masuk kategori besar.

4.3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu fungsi pengawasan (X), terhadap variabel dependen yaitu efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa

Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y). Hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program *SPSS*, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

		Coefficients ^a		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,438	,511	
	Fungsi Pengawasan	,373	,130	,622

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber : data primer, diolah 2020

Berdasarkan ringkasan hasil regresi di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,438 + 0,622$$

Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi fungsi pengawasan (X) sebesar 0,373, hal ini berarti bahwa perubahan variabel pengawasan (X) akan diikuti oleh perubahan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,373 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Persamaan regresi di atas juga menunjukkan nilai konstanta sebesar 2,438 yang berarti bahwa nilai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 2,438 jika variabel fungsi pengawasan (X) bernilai 0.

Selanjutnya variasi naik turunnya variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi (R^2) dengan model *summary* pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5.
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,622 ^a	,387	,340	,11178

a. Predictors: (Constant), Fungsi Pengawasan

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : data primer, diolah 2020

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,387 atau 38,70%, memiliki makna bahwa variabel fungsi pengawasan memberikan kontribusi sebesar 38,70% terhadap variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y). Sedangkan sisanya sebesar $100 - 38,70 = 61,30\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan pengujian hipotesis dengan maksud untuk apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.

Untuk lebih jelasnya ringkasan hasil analisis uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Output Regresi Uji-t

coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,438	,511		4,771	,000
Fungsi Pengawasan	,373	,130	,622	2,865	,013

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

Sumber : data primer, diolah 2020

Berdasarkan Output SPSS pada tabel 4.6 di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pada bab sebelumnya dapat dilihat pada uji-t sebagaimana berikut:

Pengaruh fungsi pengawasan (X) terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y) dispesifikasikan dalam hipotesis alternatif (H_a) yaitu:

H_a : Fungsi-fungsi pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y)

Berdasarkan output SPSS regresi linear sederhana di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,865. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,160, yang berarti bahwa fungsi pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan

Randangan Kabupaten Pohuwato (Y). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil dari pada tingkat kemaknaan 5% ($0,013 < 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan fungsi pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y) diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis penelitian yang menyatakan fungsi pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y) diterima. Dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan didukung dengan oleh nilai signifikansi variabel X lebih kecil dari pada tingkat kemaknaan 5%.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) pada hasil penelitian menunjukkan angka 0,387 atau 38,70%, memiliki makna bahwa variabel fungsi pengawasan memberikan kontribusi sebesar 38,70% terhadap variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Y). Sedangkan sisanya sebesar $100 - 38,70 = 61,30\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan baik pihak yang terkait maupun calon peneliti berikutnya sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada Kepala Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato agar tetap melakukan pengawasan secara intens bahkan

ditingkatkan demi tercapainya tujuan pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pengelolaan alokasi dana desa secara efektif.

2. Diharapkan kepada calon peneliti berikutnya yang ingin meneliti dalam bidang yang sama agar menambah item atau butir variabel yang ikut berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dan juga menambah variabel fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian dan fungsi pelaksanaan yang ikut mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2000. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. BPFE: Yogyakarta.
- Ferdinand. Augusty, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas. BPFE, Yogyakarta.
- Husain, Umar, 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Hanif, Prawironegoro Darsono. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep dan Aplikasi*. Mitrawanamedia. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Penerbit Bitra Indonesia, Medan.
- Lisna Ni Kadek, dkk 2018. *Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keuangan Negara*. Skripsi Universitas Udayana.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Manullang, 1991, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Marsam D. Loenardo, dkk. 2000. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. CV Karya Utama, Surabaya.
- Nazir Mohammad, 1988. *Metode penelitian*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2003, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.

Susanto Azhar, 2004. *Sistem Informasi Akuntansi I, Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur*, Edisi Kedelapan, Bandung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Permendagri Nomor 37 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

https://www.academia.edu/36097747/MemahamiSistem_Pemerintahan_Desa_.Docx

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/..buku-hukum-pengelolaan-keuangan->

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>.

<http://www.suarapembaruan.com>

<http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-saku-dana-desa>

www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5562 4 September 2019

NO.			
-----	--	--	--

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KANTOR
DESA MANUNGGAL KARYA) KECAMATAN RANDANGAN
KABUPATEN POHUWATO**

KUESIONER PENELITIAN

Nama Peneliti : Siti NurAlimah
NIM : E.21.19.132
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bapak/Ibu/Saudara responden yang terhormat,

Kuesioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya ilmiah pada program sarjana Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Manunggal Karya) Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

- Dimohon untuk membaca pernyataan secara hati-hati dan memberikan jawaban secara lengkap (tidak ada yang ditinggalkan).
- Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pilihan anda yang penting adalah memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi,
- Semua tanggapan Bapak/Ibu/Saudara akan dirahasiakan,
- Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu, saudara (i) yang telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini.

I. INSTRUMEN KUISIONER

Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini mengenai Persepsi Anda atas Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Manunggal Karya) Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. dengan

memberi tanda silang (x) pada kolom jawaban dengan memperhatikan nilai dan skor sesuai yang ditentukan.

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka dari 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan Bapak/Ibu semakin setuju terhadap materi pernyataan.

Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1	=	Sangat Tidak Setuju (STS)
Skor 2	=	Tidak Setuju (TS)
Skor 3	=	Ragu-ragu (R)
Skor 4	=	Setuju (S)
Skor 5	=	Sangat Setuju (SS)

1. FUNGSI PENGAWASAN (X)

Pernyataan Variabel fungsi Pengawasan		SS	S	N	TS	STS
Item	Indikator					
1.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai dengan rencana	5	4	3	2	1
2.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai dengan pedoman	5	4	3	2	1
3.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai dengan kebijaksanaan	5	4	3	2	1
4.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai dengan peraturan	5	4	3	2	1
5.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai capaian	5	4	3	2	1
6.	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur sudah sesuai tolak ukur	5	4	3	2	1
7.	Sudah diadakan tindakan perbaikan Penyesuaian terhadap kebijaksanaan	5	4	3	2	1
8.	Sudah diadakan tindakan perbaikan kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan	5	4	3	2	1
9.	Sudah diadakan tindakan perbaikan Kesesuaian terhadap pemberian bimbingan atau sanksi	5	4	3	2	1

2. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

Pernyataan Variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa		SS	S	N	TS	STS
tem	Indikator					
1.	Adanya perencanaan yang dilakukan oleh Sekdes dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa yang	5	4	3	2	1

	akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD sudah berjalan efektif					
2.	Sudah direncanakannya APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
3.	Sudah direncanakannya APBDesa untuk dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
4.	Sudah direncanakan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
5.	Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
6.	Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
7.	Bendahara dapat menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
8.	Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
9.	Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
10.	Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
11.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
12.	Melakukan tutup buku setiap akhir bulan sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
13.	Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
14.	Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
15.	Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
16.	Kades menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Cama yang terdiri dari laporan realisasi	5	4	3	2	1

	pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun sudah berjalan efektif					
17.	Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
18.	Lampiran Format laporan, berkenaan dengan: Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A. sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
19.	Lampiran Format laporan, berkenaan dengan Kekayaan Milik Desa, dan Program Pemerintah dan Desa yang masuk ke Desa sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1
20.	Lampiran Format laporan, berkenaan dengan Program Pemerintah dan Desa yang masuk ke Desa sudah berjalan efektif	5	4	3	2	1

***"Terima Kasih Atas Kerja Sama Anda Telah Menjawab
Kuesioner ini dengan Lengkap"***

Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi

```
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X
/RESIDUALS DURBIN.
```

Regression Siti Nur Alimah

coefcients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,438	,511		4,771	,000
Fungsi Pengawsan	,373	,130	,622	2,865	,013

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Efektivitas Pengelolaan ADD	3,9000	,13758	15
Fungsi Pengawsan	3,9193	,22949	15

Correlations

		Efektivitas Pengelolaan ADD	Fungsi Pengawsan
Pearson Correlation	Efektivitas Pengelolaan ADD	1,000	,622
	Fungsi Pengawsan	,622	1,000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas Pengelolaan ADD	.	,007
	Fungsi Pengawsan	,007	.
N	Efektivitas Pengelolaan ADD	15	15
	Fungsi Pengawsan	15	15

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fungsi Pengawasan ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD
b. All requested variables entered.

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1		Sig. F Change
1	,622 ^a	,387	,340	,11178	,387	8,209	1	13	,013

- a. Predictors: (Constant), Fungsi Pengawasan
b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,103	1	,103	8,209	,013 ^b
	Residual	,162	13	,012		
	Total	,265	14			

- a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD
b. Predictors: (Constant), Fungsi Pengawasan

Coefficient Correlations ^a			
Model			Fungsi Pengawasan
1	Correlations	Fungsi Pengawasan	1,000
	Covariances	Fungsi Pengawasan	,017

- a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Fungsi Pengawasan
1	1	1,998	1,000		
	2	,002	35,385	,00 1,00	,00 1,00

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,8070	4,0532	3,9000	,08560	15
Residual	-,17112	,16991	,00000	,10771	15
Std. Predicted Value	-1,086	1,790	,000	1,000	15
Std. Residual	-1,531	1,520	,000	,964	15

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan ADD

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

Resp.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1.16	Y1.17	Y1.18	Y1.19	Y1.20	Total	Rata2
1	4	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	76	3,80
2	5	3	5	4	3	4	4	4	4	3	4	5	3	4	5	4	4	5	3	4	80	4,00
3	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	78	3,90
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	76	3,80
5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	3	3	4	3	76	3,80
6	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	83	4,15
7	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	5	4	79	3,95
8	4	4	4	4	4	3	5	3	5	3	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	82	4,10
9	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	78	3,90
10	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	75	3,75
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4	4	3	76	3,80	
12	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	73	3,65	
13	3	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78	3,90	
14	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	81	4,05	
15	3	5	2	5	5	3	4	4	4	2	5	5	4	4	3	5	4	4	4	79	3,95	

FUNGSI PENGAWASAN

Resp.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total	Rata2
1	4	4	3	4	5	4	4	3	4	35	3,89
2	5	5	4	4	5	3	4	5	4	39	4,33
3	4	4	4	4	5	4	3	4	3	35	3,89
4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	37	4,11
5	5	3	3	4	4	4	4	3	4	34	3,78
6	4	4	5	4	5	4	5	5	3	39	4,33
7	3	4	3	4	5	4	3	4	4	34	3,78
8	3	5	3	4	5	5	4	4	3	36	4,00
9	4	3	4	3	3	4	5	4	3	33	3,67
10	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34	3,78
11	4	5	4	3	4	3	4	4	4	35	3,89
12	3	4	4	3	4	4	4	3	4	33	3,67
13	4	4	4	3	3	4	4	4	3	33	3,67
14	4	3	4	4	5	5	5	4	4	38	4,22
15	4	4	3	5	4	3	4	3	4	34	3,78

Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2019				Tahun 2020					
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal & Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

Skripsi SITI NUR ALIMAH.docx
Aug 31, 2020
9826 words / 60824 characters

Skripsi SITI NUR ALIMAH.docx

Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

www.scribd.com	
INTERNET	
repository.unhas.ac.id	5%
INTERNET	
www.kemenkeu.go.id	3%
INTERNET	
eprints.umm.ac.id	2%
INTERNET	
digilib.unila.ac.id	2%
INTERNET	
journal.iaingorontalo.ac.id	1%
INTERNET	
e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id	1%
INTERNET	
repository.radenintan.ac.id	1%
INTERNET	
id.wikipedia.org	1%
INTERNET	
ononihablogs-damailaia.blogspot.com	1%
INTERNET	
sosipol.blogspot.com	<1%
INTERNET	
es.scribd.com	<1%
INTERNET	
docobook.com	<1%
INTERNET	
www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id	<1%
INTERNET	
eprints.uns.ac.id	<1%
INTERNET	
de.slideshare.net	<1%
INTERNET	
media.neliti.com	<1%
INTERNET	
www.coursehero.com	<1%
INTERNET	

19	abstrak.ta.uns.ac.id	INTERNET	
20	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
21	ejournal.pin.or.id	INTERNET	<1%
22	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
23	ejurnal.unikarta.ac.id	INTERNET	<1%
24	endyf.blogspot.com	INTERNET	<1%
25	www.ejournal-s1.undip.ac.id	INTERNET	<1%
26	skripsi-anthogoodwill-stiabone.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	jurnal.unigo.ac.id	INTERNET	<1%
28	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
29	Ines Saraswati Machfiroh. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH", Jurnal Riset Akuntansi Polit...	CROSSREF	<1%
30	kopiapung.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
32	vdocuments.site	INTERNET	<1%
33	anzdoc.com	INTERNET	<1%
34	eprints.unm.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Siti Nuralimah
NIM : E2119132
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian : Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Juni 2020

Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN RANDANGAN
DESA MANUNGAL KARYA

Alamat : Jln Trans Randangan Taluditi No. KP : 96268
 Telp : (0435) 7770172 Email : desamkarya81@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 140 /DMK-RDGN/X /I /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, dengan ini Memberikan Keterangan Kepada :

Nama

: Siti Nurallmah

NIM

: E21.19.132

Alamat

: Dusun Galuh Sari Desa Manunggal karya
 Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar Telah melakukan penelitian dengan judul Skripsi " **Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Manunggal Karya) Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato** " di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Manunggal Karya, 25 Januari 2020

Kepala Desa





UNIVERSITAS ICHSAN (UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NO. 84/D/O/2001
Jl. Raden Saleh No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI No. 609/UNISAN-G/SR-BP/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Nuralimah
NIM : E21.19.132
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo 11 Juni 2020
Tim Verifikasi,

Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	: Siti Nuralimah
NIM	: E21.19.132
Tempat/Tgl Lahir	: Marisa, 15 januari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2016
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen keuangan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.

2. Riwayat pendidikan

1. Menyelesaikan belajar SDN INP II Manunggal Karya, pada tahun 2010.
2. Kemudian melanjutkan di MTs Salafiyah Syafi'iyah, Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2013.
3. Selanjutnya di SMK Salafiyah Syafi'iyah, Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2016.
4. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.
5. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian Technopreneur (KKLP Technopreneur) di Desa kalimas, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato pada tahun 2019.